

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Banyak negara berkembang di dunia ini yang sudah berhasil, tetapi permasalahan dalam negara itu sendiri pun masih banyak yang belum terselesaikan, seperti pengangguran, tingkat kelahiran yang sangat tinggi, minimnya tenaga ahli, dan susahny mendapatkan tempat untuk bekerja. Keadaan ini pun menjadi sorotan oleh ahli-ahli ekonomi dengan permasalahan pembangunan bukanlah arti dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering kali diartikan dengan suatu hal yang sama oleh beberapa ahli ekonomi, tetapi pada dasarnya dua hal itu berbeda pengertiannya. Perubahan-perubahan pada berbagai sektor ekonomi tersebut akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan naiknya produksi nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan perkapita. Situasi semacam itu akan berlangsung secara terus-menerus.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi secara makro adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi disamping dua tujuan lainnya yaitu pemerataan dan stabilitas. Indikator ini penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, dikarenakan dapat memberikan gambaran makro atas kebijakan yang telah dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan terus meningkat.

Boediono dalam Robinson Tarigan menyatakan bahwa “Pengertian Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang.” Jadi, persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.”<sup>1</sup> Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengaitkan dan menghitung persentase pertambahan tingkat pendapatan nasional dari satu periode ke periode berikutnya. Angka pertumbuhan ekonomi umumnya dalam bentuk persentase adalah positif, tetapi mungkin juga negatif. Pertumbuhan ekonomi yang negative disebabkan adanya penurunan yang lebih besar dari pendapatan nasional tahun berikutnya dibandingkan tahun sebelumnya. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, faktor faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi laju suatu pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya ada beberapa komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemampuan teknologi, dan pembagian kerja dan skala produksi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu perekonomian adalah sumber daya alam, kekayaan alam suatu negara, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negara, baik juga terhadap daerah-daerah, kota dan berbagai propinsi dalam suatu negara. Tanah dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan ekonomi, tersediaannya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Sumber daya alam yang melimpah harus dapat dimanfaatkan secara tepat dengan

---

<sup>1</sup>Robinson Tarigan, **Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Medan : Bumi Aksara, 2007, hal. 46.

teknologi yang baik dikarenakan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, sumber daya harus dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan yang ada.

Profesor Lewis dalam M. L Jhingan mengatakan bahwa “Nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunaannya, dan kegunaannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam selera, perubahan dalam teknik atau penemuan baru.”<sup>2</sup> Jadi melalui pemanfaatan sepenuhnya terhadap sumber daya alam, maka setiap daerah atau wilayah harus dapat mengembangkan dirinya sendiri secara ekonomis ketika terjadi perubahan-perubahan teknik atau penemuan baru, misalnya perubahan tingkat teknologi. Perubahan ini dianggap sebagai faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan berkaitan dengan perubahan metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, perubahan tingkat teknologi atau kemajuan teknologi terjadi karena telah ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian dan bertani dan membangun rumah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah.

Menurut Hellen , Sri Mintarti , Fitriadi berpendapat bahwa :

**Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan**

---

<sup>2</sup>M. L Jhingan, **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas, Penerjemah D. Guritno, Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2007, hal. 68.

**menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>**

Sebagaimana kita tahu pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang penting dalam perekonomian modern. Pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit ekonomi yang lainnya seperti rumah tangga dan perusahaan. Bagi Negara yang sedang berkembang campur tangan pemerintah sangat relatif besar sehingga peranan pemerintah dalam perekonomian juga relative besar, dan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong dan berjalannya pertumbuhan ekonomi setiap tahun.

Investasi juga salah satu yang mendukung pembangunan ekonomi. Kegiatan penanaman modal akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap

---

<sup>3</sup>Hellen , Sri Mintarti dan Fitriadi, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja”, **Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis**, Volume 13 nomor 1, 2017, hal. 30.

pertumbuhan ekonomi. Dimana dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dibawah ini dapat di lihat pada Tabel 1.1 perkembangan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan angkatan kerja sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Sumatera Utara Tahun 2001-2018**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengeluaran Pemerintah (milyar rupiah)	Investasi (milyar rupiah)	Angkatan Kerja ( jiwa)
2001	4.0	661.20	104616.96	3.206.535
2002	4.6	983.30	102529.61	4.283.857
2003	4.8	1255.40	127013.38	4.239.910
2004	5.0	1501.50	263109.14	5.544.170
2005	5.7	1830.60	401152.39	5.803.112
2006	5.5	2184.70	1105818.04	5.491.696
2007	6.9	2560.70	1817011.48	5.654.131
2008	6.3	2967.30	1661623.63	6.094.802
2009	5.1	3444.56	12170570.06	6.298.070
2010	6.4	3666.00	9713339.20	6.617.377
2011	6.6	4611.47	44849524.79	6.314.239
2012	6.5	7633.63	4131193.37	6.131.664
2013	6.1	7260.47	5834329.57	6.311.762
2014	5.2	7808.56	17971321.57	6.272.083
2015	5.1	7959.17	11521950.97	6.355.098
2016	5.2	9476.42	7062086.38	6.362.909
2017	5.1	12518.86	18776676.90	6.734.269
2018	5.1	13867.54	21266758.90	7.124.000

**Sumber** : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (berbagai terbitan)

Dari Tabel 1.1 dapat di lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak stabil atau fluktuasi, karena pertumbuhan ekonomi mengalami naik turun. Tahun 2001 sampai 2005 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu tahun 2001 mencapai 3,72 % dan tahun 2005 mencapai 5,7 %. Dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 5,5 %, serta tahun 2007 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2007 mencapai 6,9 % dan pada tahun 2018 mencapai 5,13 %. Hal ini dikarena adanya ketidakstabilan dalam pengolahan sumber daya alam, lapangan usaha dan pengolahan berbagai sektor-sektor belum sepenuhnya optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Oleh sebab itu perekonomian di Sumatera Utara harus ditingkatkan lagi, karena pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan dan sebagai pemegang utama dalam menjalankan pengolahan sumber daya alam, lapangan usaha serta pengolahan berbagai sektor-sektor ekonomi dalam mewujudkan perekonomian yang stabil setiap tahun.

Pada Tabel 1.1, pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 sampai 2018 mengalami kenaikan sebanyak 13.206,34 milyar rupiah, dimana pada tahun 2001 hanya 661,20 milyar rupiah meningkat menjadi 13.867,54 milyar rupiah pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong berjalannya pengolahan sumber daya alam dan berbagai sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Selain itu, investasi pun menunjukkan kenaikan walaupun kadang kala mengalami fluktuasi. Misalnya tahun 2002-2007, dan tahun 2016-2018 menunjukkan kenaikan. Investasi tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 24.000.000,82 miliar rupiah, dan investasi paling terendah

adalah tahun 2005 sebesar 351.509,12 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara tingkat suku bunga dan pergerakan harga saham. Ketika suku bunga naik, harga saham yang diperdagangkan akan cenderung menurun, begitu juga sebaliknya jika suku bunga menurun, harga saham yang diperdagangkan akan cenderung naik. Hal ini dapat terjadi karena ketika suku bunga naik, investor akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya.

Pada Tabel 1.1, angkatan kerja mengalami fluktuasi walaupun dalam beberapa tahun menunjukkan kenaikan. Misalnya dari tahun 2003-2005, tahun 2006-2010 dan tahun 2014-2018. Angkatan kerja tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 7.124.000 jiwa, sedangkan Angkatan kerja paling rendah adalah tahun 2001 sebesar 5.206.535 jiwa. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakstabilan pada populasi pertumbuhan penduduk. Selain itu karena tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga banyak usia angkatan kerja tidak terserap di Propinsi Sumatera Utara dimana kualifikasi pendidikan menjadi salah satu syarat penting untuk bisa bekerja.

Secara umum, pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah angkatan kerja mengalami fluktuasi. Demikian juga halnya dengan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara. Fenomena ini menarik untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 2001-2018”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018?
- 2) Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018?
- 3) Bagaimanakah pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah wawasan penelitian regional sumatera utara dan untuk memperkaya wawasan mahasiswa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengeluaran pemerintah**

##### **2.1.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik

dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Menurut Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti "Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB)."<sup>4</sup>

Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran. Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat. Besarnya pengeluaran pemerintah yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki batas tertentu. Pengeluaran pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah mampu menciptakan kondisi di mana besarnya pengeluaran pemerintah terhadap tingkat output seluruhnya dapat digunakan untuk menyediakan barang publik yang digunakan sebagai input produksi yang kompetitif.

---

<sup>4</sup>Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya", **Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan**, Volume 9, Nomor 1, April 2008, hal. 45.

Selain itu pemerintah juga harus melakukan pengeluaran yang rutin supaya dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian. Besarnya pengeluaran rutin yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dikarenakan oleh kenaikan belanja pegawai dan pembayaran hutang pemerintah. Selain itu, pemerintah juga banyak mengeluarkan anggaran pada berbagai macam subsidi.

### **2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah**

Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini :

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga faktor- faktor produksi

Asahdi, Abubakar Hamzah, Dan Said Musnadi berpendapat bahwa :

**Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah : jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup>Asahdi, Abubakar Hamzah, dan Said Musnadi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia", **Jurnal Ilmu Ekonomi**, Volume 3, No. 2, Mei 2015, hal. 66.

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif atau DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana bagi hasil pajak dan pmda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **2.1.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Suparmoko dalam Merlin Anggraeni Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.**
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah**

menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

- 3) Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
- 4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar<sup>6</sup>

#### 2.1.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam M. Zahari MS mengatakan bahwa :

**Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup>**

## 2.2. Investasi

### 2.2.1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja.

---

<sup>6</sup>Merlin Anggraeni, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015” Skripsi : Fakultas ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hal. 27-28 ( skripsi tidak diterbitkan).

<sup>7</sup>M. Zahari MS, “Faktor Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”, **Jurnal of Economics and Business**, Volume 1, No. 1, September 2017, hal. 187.

Menurut Suherman bahwa :

***Autonomous investemen* (investasi otonom) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, tetapi dapat bergeser ke atas atau ke bawah karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor-faktor selain pendapatan yang mempengaruhi tingkat investasi seperti itu adalah, misalnya, tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha, dan sebagainya.”<sup>8</sup>**

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan investasi yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus untuk barang-barang yang bersifat umum. Pada saat tingkat inflasi tinggi maka hal ini akan dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. *Induced investment* ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Dimana pada saat tingginya investasi berpengaruh pada berbagai tingkat pendapatan, dan investasi seperti ini meningkatkan ketidakpastian antara kreditor dan debitor. Karena dalam kondisi yang seperti itu akan menyebabkan kreditor maupun debitor berusaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang akan mengakibatkan perusahaan mereka mengalami kebangkrutan, sehingga dengan hal ini akan mengurangi minat investor atau dalam hal ini dikatakan kreditor untuk memberikan pinjaman sehingga jumlah investasi akan mengalami penurunan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dengan tingginya inflasi dapat menurunkan minat individu untuk berinvestasi. Dengan kata lain ada hubungan negatif antara inflasi dan investasi.

Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh investor turut menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian.

Menurut Sadono Sukirno faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Suherman, Rosyidi. **Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hal. 188

- i. **Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.**
- ii. **Suku bunga.**
- iii. **Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.**
- iv. **Kemajuan teknologi.**
- v. **Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.**
- vi. **Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.<sup>9</sup>**

### 2.2.2. Jenis-Jenis Investasi

Menurut bodie dalam Hendy Tannady , Riky Mulyadi dan Ricky Cahyadi jenis-jenis investasi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. **Investasi dalam bentuk aset riil (*real assets*) = Yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu mulia dan sebagainya.**
2. **Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas (*marketable securities financial assets*) = Yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu lembaga/perorangan tertentu.<sup>10</sup>**

Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Lebih jelasnya, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Salim dan Budi dalam Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis menjelaskan bahwa PMA atau Penanaman modal Asing adalah

---

<sup>9</sup>Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Cetakan Ke 24, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hal. 122.

<sup>10</sup>Hendy Tannady , Riky Mulyadi dan Ricky Cahyadi, “Penentuan Jenis Investasi dengan Analisa Ekonomi Teknik dan Forecasting”, **Jurnal Ilmiah Teknik Industri**, Volume 13, No. 2, Desember 2014, hal. 134.

**“Penanaman Modal Asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.”<sup>11</sup>**

### **2.2.3. Dampak investasi**

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tidak dibedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Didalam melakukan sesuatu apalagi berkaitan dengan negara yang notabnya melibatkan warga masyarakatnya, penanaman modal atau investasi terdapat dampak yang ditimbulkannya baik itu positif maupun negatif. Dampak positif investasi adalah Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, alih teknologi, peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan, dan mendorong kemajuan produsen dalam negeri. Sementara itu dampak negatif investasi adalah terbengkalainya sektor pertanian, kerusakan lingkungan, berkurangnya lahan produktif, eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan hasil usaha lebih banyak dibawa ke negara asalnya. Menurut Mankiw dalam Enni Sari Siregar mengatakan bahwa: “pengeluaran untuk barang-

---

<sup>11</sup>Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia”, **Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)** -Vol. 8, No. 1, Maret 2016, hal. 12.



barang investasi bertujuan meningkatkan standard hidup untuk tahun-tahun mendatang dan Investasi adalah komponen GDP yang mengaitkan masa kini dan masa depan”<sup>12</sup>.

#### **2.2.4. Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

**Tri Handayani dalam** Puspasari Windy Astuti mengatakan bahwa :

**Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**<sup>13</sup>

### **2.3. Angkatan kerja**

#### **2.3.1. Pengertian Angkatan Kerja**

Secara umum, pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang secara aktif melakukan suatu kegiatan ekonomi. *Labor Force* atau angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang pada dasarnya terlibat maupun berusaha untuk terlibat dalam suatu kegiatan produksi barang dan jasa. Angkatan kerja merupakan penduduk yang dalam setiap kegiatan utamanya dalam seminggu yang lalu bekerja dan penduduk yang sedang dalam mencari pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rizki Herdian Zenda, Suparno pengertian angkatan kerja sebagai berikut :

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang lamanya bekerja paling sedikit dua hari.**
- b. Mereka selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah pekerja tetap pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena**

---

<sup>12</sup>Enni Sari Siregar, “Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara”, **Jurnal Education and development STKIP Tapanuli Selatan**, Vol. 1, No. 4, Mei 2016, hal. 2.

<sup>13</sup>Puspasari Windy Astuti, “**Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**”, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2018, hal. 29 ( skripsi tidak diterbitkan).

**seminggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang dan sebagainya.<sup>14</sup>**

Dengan demikian angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara optimal disebut pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan adalah:

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, mereka yang pernah bekerja, pada saat menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
2. Mereka yang sedang di bebas tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
3. Mereka yang bebas tugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi.

Angkatan kerja juga mencakup semua penduduk di usia produktif (15-64 tahun), baik yang sudah memiliki pekerjaan, maupun yang belum memiliki pekerjaan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja, yaitu struktur umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kedua faktor ini harus selalu diperhatikan oleh pemerintah agar permintaan dan penawaran tenaga kerja selalu seimbang, sehingga angka pengangguran pun dapat ditekan.

---

<sup>14</sup>Rizki Herdian Zenda, Suparno, "Peranan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya", **Jurnal Ekonomi & Bisnis**, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hal. 373.

Menurut Sadono Sukirno, untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, sebagai berikut :

**Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu : (i) jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia di antara 15-64 tahun yang *tidak ingin bekerja* (contohnya adalah : pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela lain).<sup>15</sup>**

### 2.3.2. Jenis-jenis Angkatan Kerja

#### 1. Bekerja penuh

Angkatan kerja yang bekerja penuh memanfaatkan jam kerjanya secara penuh sehari-hari, yaitu sekitar 8-10 jam per hari. Seorang tenaga kerja dikatakan bekerja penuh apabila melakukan pekerjaannya sebagai rutinitas sehari-hari dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, dan waktu minimal bekerja dalam seminggu adalah dua hari.

#### 2. Setengah Menganggur

Seorang tenaga kerja yang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja setengah pengangguran adalah pekerja yang tidak memanfaatkan waktu kerjanya dengan maksimal, apabila ditinjau dari jam kerja yang digunakan, produktivitas kerja, dan penghasilan. Angkatan kerja setengah pengangguran sendiri dapat digolongkan sesuai dengan jam kerja, produktivitas, dan penghasilan, dalam dua golongan yaitu (1) Setengah menganggur kentara, yaitu angkatan kerja yang memiliki jam kerja kurang lebih 35 jam dalam seminggu, dan (2) Setengah menganggur tidak kentara, yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja secara produktif dan memiliki penghasilan yang tergolong rendah.

#### 1. Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi dimana seorang angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan secara aktif.

---

<sup>15</sup>Sadono Sukirno, **Op.Cit.**, hal. 18.

### 2.3.3. Hubungan Angkatan Kerja Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Nurul Huda, Taufiq Marwa, M. Syirod Saleh hubungan angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah :

**Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meskipun demikian, pengaruh pertumbuhan penduduk sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut.<sup>16</sup>**

## 2.4. Pertumbuhan Ekonomi

### 2.4.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Sadono Sukirno menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah :

---

<sup>16</sup>Nurul Huda, Taufiq Marwa, M. Syirod Saleh, " Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer di Propinsi Sumatera Selatan", **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, Volume 5, Nomor 1, Maret 2007, hal. 51.

**Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa, dan penambahan produksi barang modal.<sup>17</sup>**

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Para ekonom mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping itu juga memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun social. dana yang dibutuhkan untuk menambah modal tersebut biasa disebut investasi. berbicara tentang investasi tentunya sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh negaranegara berkembang yang berlomba memacu pertumbuhan ekonominya, sedangkan di sisi lain masih memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan saling tumpang tindih.

Demikian pula halnya masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah kebutuhan dana investasi yang cukup besar. Adanya masalah keterbatasan dalam akumulasi dana, peran sektor keuangan menjadi sangat penting di negara sedang berkembang. Pembangunan sektor keuangan di negara sedang berkembang pada awalnya ditandai oleh kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembatasan (*restriction*) dan penindasan (*repression*) terhadap sektor keuangan seperti adanya pembatasan suku bunga perbankan oleh pemerintah, alokasi kredit yang selektif, *reserve requirement* perbankan yang tinggi dan lain-lain.

#### **2.4.2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro dalam Eko Wicaksono Pambudi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

---

<sup>17</sup>Sadono Sukirno, **Op.Cit.**, hal. 423

### **1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja**

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabene merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

### **2. Akumulasi Modal**

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

### **3. Kemajuan Teknologi**

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.<sup>18</sup>

## **2.4.3. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi**

Satu kegunaan penting dari pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun, dengan mengamati pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dengan mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat dilakukan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Menurut Dhita Nur Elia Fitri data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang :

- 1) Sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati**

---

<sup>18</sup>Eko Wicaksono Pambudi, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) Skripsi : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, 2013, hal. 23 (skripsi tidak diterbitkan).

## 2) Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi.<sup>19</sup>

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan barang dan jasa yang di produksi suatu negara. Suatu negara perlu menghitung pendapatan nasional riil, yaitu produk nasional bruto riil atau produk domestik bruto riil. Dalam perhitungan pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga konstan, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Pertumbuhan PDB Harga Konstan Indonesia tahun 2013 naik, dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dilihat dari tahun sebelumnya.

Menurut Mankiw dalam Dhita Nur Elia Fitri bahwa :

**PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah belanja untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Alasan PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran secara bersama adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total.<sup>20</sup>**

## 2.5. Penelitian terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dalam skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin dengan judul **“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2006-2015”**, menyimpulkan bahwa :

**“Nilai signifikan variabel Investasi sebesar 0,039 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha$  (0,05), menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ( $0,039 < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, dengan demikian**

---

<sup>19</sup>Dhita Nur Elia Fitri, **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1984-2013”**, Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal. 28 (skripsi tidak diterbitkan).

<sup>20</sup>Ibid, hal. 29

**Investasi berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi”.**<sup>21</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulina Eliza, dengan judul **“Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat”**, menyimpulkan bahwa :

**“Angkatan kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel angkatan kerja (X2) adalah sebesar 0,550 dengan nilai probability sebesar 0,000 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat”.**<sup>22</sup>

Kemudian Nurul Fitriani dengan judul **“Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015”** menyimpulkan bahwa :

**Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki t-hitung sebesar 4,424666 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah secara individu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf 5%. nilai koefisien regresi sebesar 0,665093 menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta. hal ini berarti apabila terjadi peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,665093%.**<sup>23</sup>

## **2.6. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan pada teori teori yang dibahas serta dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen

---

<sup>21</sup>Siti Hardiningsih Arifin, **“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2006-2015”**, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hal. 70 (skripsi tidak diterbitkan).

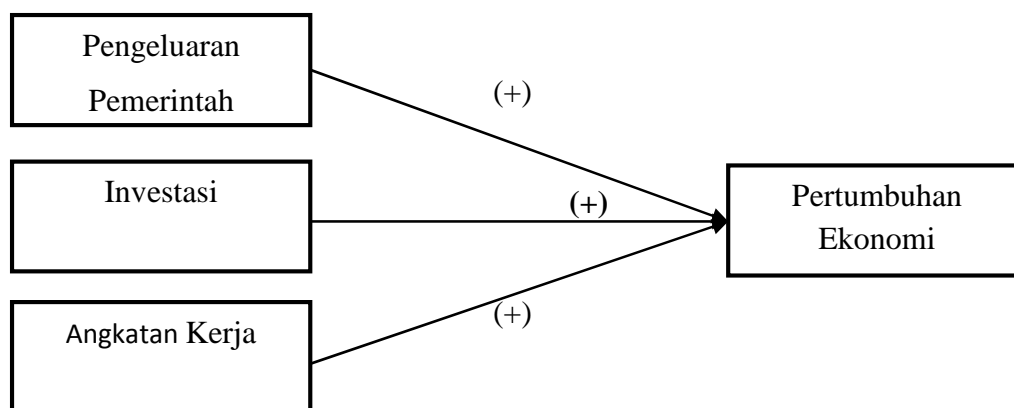
<sup>22</sup>Yulina Eliza, **“Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**, Dalam **Pekbis Jurnal**, Volume 7, Nomor 3, November 2015, hal. 207-208..

<sup>23</sup>Nurul Fitriani, **“Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015”**, Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hal. 66 (skripsi tidak diterbitkan).



adalah pengeluaran pemerintah, investasi dan angkatan kerja serta variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel tersebut akan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus diregresikan dengan variabel dependennya, untuk mengetahui kesignifikan pengaruh tersebut. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan hasil tingkat signifikan setiap variabel independen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tingkat signifikan setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab turunnya atau merosotnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2001-2018 sebagai berikut :



**Gambar :** Kerangka pemikiran

## 2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Purba dan Parulian menyebutkan bahwa “Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakiki dari hubungan antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris”.<sup>24</sup>

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2001-2018.
- b. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2001-2018.
- c. Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2001-2018.

---

<sup>24</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjutak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal 34.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Propinsi Sumatera Utara dengan menganalisis data pengeluaran pemerintah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2001-2018.

#### **3.2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara tahun periode 2001-2018
- b. Data investasi di Sumatera Utara tahun periode 2001-2018
- c. Data angkatan kerja di Sumatera Utara tahun periode 2001-2018
- d. Data pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara periode 2001-2018

#### **3.3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2001-2018.

### 3.4. Model Analisis

#### 3.4.1. Model Kuantitatif

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2001-2018 menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam analisis ini, dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linear berganda.

#### 3.4.2. Penggunaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \hat{S}_0 + \hat{S}_1 X_1 + \hat{S}_2 X_2 + \hat{S}_3 X_3 + \quad i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan ekonomi (%)

$\hat{S}_0$  = Intersep

$\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pengeluaran pemerintah (Milyar rupiah)

X<sub>2</sub> = Investasi (Milyar rupiah)

X<sub>3</sub> = Angkatan Kerja (Juta jiwa)

i = Galat (*Error term*)

### 3.4.3. Pengujian hipotesis (Pendugaan Total)

#### 3.4.3.1 Uji Secara Individu ( Uji -t )

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas atau independen (pengeluaran pemerintah, investasi dan angkatan kerja) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat atau dependen (pertumbuhan ekonomi), maka dilakukan pengujian dengan Uji-t dengan taraf nyata = 5% sebagai berikut :

##### a) Pengeluaran Pemerintah ( $X_1$ )

$H_0$ :  $S_1 = 0$  artinya, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1$ :  $S_1 > 0$  artinya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah : 
$$t_h = \frac{\hat{S}_1 - S_1}{S(\hat{S}_1)}$$

$\hat{S}_1$  : koefisien regresi

$S_1$  : parameter

$S(\hat{S}_1)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Artinya pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, Artinya pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

##### b) Investasi ( $X_2$ )

$H_0$ :  $S_2 = 0$  artinya, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1$ :  $S_2 > 0$  artinya, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah : 
$$t_h = \frac{\hat{S}_2 - S_2}{S(\hat{S}_2)}$$

$\hat{S}_2$  : koefisien regresi

$S_2$  : parameter

$S(\hat{S}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### c) **Angkatan Kerja**

$H_0: S_3 = 0$  artinya, angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1: S_3 > 0$  artinya, angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah : 
$$t_h = \frac{\hat{S}_3 - S_3}{S(\hat{S}_3)}$$

$\hat{S}_3$  : koefisien regresi

$S_3$  : parameter

$S(\hat{S}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, Artinya angkatan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian

apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, Artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3.4.3.2. Uji secara Simultan (*Uji-F*)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Tujuan uji statistic F ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0$ :  $\hat{S}_1 = \hat{S}_2 = \hat{S}_3 = 0$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1$ :  $\beta_i$  tidak semua nol ,  $i = 1, 2, 3$ , berarti variabel bebas secara serentak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denomenator (n-k).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

Keterangan :

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat.

### **3.4.3.3. Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. jika  $R^2$  mendekati 1 artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya”.<sup>25</sup>

## **3.5. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik**

### **3.5.1. Multikolinieritas**

Menurut Agus Widarjono ”multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi”<sup>26</sup>. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.

---

<sup>25</sup>Agus Widarjono, **Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013, hal. 26.

<sup>26</sup> **Ibid**, hal. 104.



d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*). Bila nilai  $VIF \leq 10$  dan  $Tol \geq 0.1$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya  $VIF \geq 10$  dan  $Tol \leq 0.1$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai  $R^2$  sekuensial dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  sekuensial lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### 3.5.2. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji : Durbin Watson (Uji D – W). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen".<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>H.Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal. 108 .

Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $n$ . Secara umum bisa diambil patokan :

- 1) Angka D - W di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D - W di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.
- 3) Angka D - W di antara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.

Apabila dalam uji D – W tidak berkorelasi maka ditambahkan uji lainnya salah satunya adalah uji Run

### 3.5.2.2. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. "Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)".<sup>28</sup> Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

1.  $H_0$  : Galat ( $res_i$ ) random (acak)
2.  $H_1$  : Galat ( $res_i$ ) tidak random

### 3.5.3. Uji Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \epsilon_i$$

1.  $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  Apakah galat (*distribunce error*) menyebar normal atau

---

<sup>28</sup> **Ibid**, hal. 116.

tidak.

2.  $\epsilon$  tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil".<sup>29</sup> Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis uji statistik.

- a. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

- b. Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik parametrik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> **Ibid**, hal. 154.

$$z_{\text{skewness}} = \frac{\text{skewness}}{\frac{6}{n}} \text{ dan } z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{kurtosis}}{\frac{24}{n}}$$

- c. Menurut Ghozali "uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)".<sup>30</sup> Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### 3.6. Definisi Operasional Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kenaikan kapasitas produksi Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan yang dinyatakan dalam persen per tahun.

2. Pengeluaran Pemerintah

Merupakan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengolahan sumber daya alam, lapangan usaha, dan pengolahan berbagai sektor-sektor lainnya yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya yang dinyatakan dalam milyar rupiah per tahun.

3. Investasi

Merupakan jumlah penanaman modal yang dilakukan oleh investor yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Utara yang dinyatakan dalam milyar rupiah per tahun.

4. Angkatan kerja

---

<sup>30</sup> **Ibid**, hal. 158.

Merupakan penduduk usia kerja (penduduk yang sudah berusia 15-64 tahun) baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam juta jiwa per tahun.